



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPP PBJ)
TAHUN 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi Program Pelatihan terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPP PBJ);
- c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu dilakukan Akreditasi Program Pelatihan terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPP PBJ) Tahun 2018.

Mengingat :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPP PBJ) TAHUN 2018.**

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ dan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat yang berlaku sesuai dengan peringkat akreditasinya;

KETIGA : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

DR. AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Rektor Institut Teknologi Bandung;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENETAPAN STATUS
AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN
DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA (LPP
PBJ) TAHUN 2018.
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TANGGAL : 06 APRIL 2018

**DAFTAR LPP PBJ
TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Manusia dan Organisasi (UPT PMO) Institut Teknologi Bandung	Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	Terakreditasi A	6 April 2018 s.d 5 April 2023

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

DR. AGUS PRABOWO